

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Perlu Diatur Jam Masuk dan Pulang Kerja

Dewan Sarankan Pemprov DKI Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Terapkan New Normal

JAKARTA—DPRD DKI menyarankan Pemprov DKI agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur jam masuk dan jam keluar kantor pegawai. Koordinasi sangat penting agar tidak terjadi penumpukan pada jam tertentu seperti yang terjadi ketika kondisi normal.

Kebijakan serupa juga diharapkan diberlakukan pada sektor perusahaan swasta. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan fokus memikirkan pola operasi angkutan umum jika tatanan hidup baru atau new normal diterapkan. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari penumpukan penumpang dari masyarakat yang mulai kembali beraktivitas.

Sehingga ada keseragaman dan lebih efektif menghindari penumpukan penumpang pada jam sibuk ketika penerapan new normal. Pembagian perlu dilakukan mengingat prinsip jaga jarak fisik satu meter harus diterapkan. "Diperlukan koordinasi dengan pusat atau Kementerian Pusat. Dasar koordinasi ini adalah komunikasi yang baik, tidak kompetitif," tuturnya.

Di sisi lain, Pemprov akan kesulitan kalau harus memperbanyak armada



Dasar koordinasi ini adalah komunikasi yang baik, tidak kompetitif."

Gilbert Simanjuntak
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI

atau meningkatkan frekuensi keberangkatan armada transportasi. "Disarankan tiga gelombang jarak sejam, mengingat diperlukan jarak satu m antarpemumpang dan sulitnya menambah jumlah moda transportasi. Juga frekuensi keberangkatan moda transportasi diperbanyak," ujarnya.

Paling Terpuak

Di lain sisi Gilbert Simanjuntak menyebut perekonomian menjadi salah sektor paling terpuak dengan adanya pandemi Covid-19. Sebab, selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya ada 11 sektor usaha yang boleh beroperasi. Wacana pemberlakuan new normal di ibu kota pun mulai didengungkan seiring bakal berakhirnya PSBB tahap III pada 4 Juni ini.

Jika DKI menerapkan new normal, perekonomian diperkirakan bakal kembali menggeliat dalam beberapa bulan ke depan. "Melihat rencana pelonggaran yang mungkin akan bertahap, butuh waktu beberapa bulan ke depan. Untuk ekonomi bergerak seperti dua bulan sudah menggeliat lagi," ucapnya. Meski memprediksi perekonomian bakal kembali

menggeliat, namun ia pesimis tahun ini kondisi perekonomian, khususnya

di DKI Jakarta bakal kembali normal seperti sebelum Covid-19 mewabah.

"Kalau kondisi normal seperti dulu saya kira tahun depan ya," ujarnya. Pandemi Covid-19 ini sendiri turut memberikan pengaruh secara langsung kepada kas daerah. APBD DKI Jakarta tahun 2020 pun terkoreksi cukup dalam akibat berkurangnya pemasukan dari sektor pajak, khususnya pariwisata.

Padahal, Gilbert menyebut, pajak dari sektor pariwisata selama ini menjadi penyumbang APBD DKI terbesar. "Yang paling terpuak sektor pariwisata. Padahal ini menyumbang besar untuk APBD," kata Gilbert. Jenis pajak dari sektor pariwisata sendiri meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Semula, Pemprov DKI menargetkan mendapat pemasukan dari tiga jenis pajak itu hingga Rp 7,3 triliun. Namun, imbas dari mewabahnya Covid-19, diperkirakan Pemprov DKI hanya akan mendapatkan Rp 2,37 triliun atau menurun 67,53 persen dari target awal.

Meski penerapan new normal dimulainya tak mampu memperbaiki kondisi kas daerah saat ini, namun paling tidak kegiatan perekonomian yang mulai menggeliat bisa menghindarkan terkoreksinya APBD DKI lebih dalam lagi. "Kalau untuk kesejahteraan dan APBD, tahun ini pasti tidak kembali ke semua. Tahun depan juga belum karena kondisi ini global," tuturnya. (dni)